



JURNAL ISIP VOICE

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Available online at <https://journal.bengkuluinstitute.com/index.php/fisipvoice>

Vol. 5 No. 1, January-June 2026, pages: 45-54

ISSN: 2963-1874

<https://doi.org/10.58222/mzxcw6w07>

Evaluation Of The Targeting Accuracy Of The Smart Indonesia Program (PIP)

(Case study of SD Negeri 52, SMP Negeri 6, and SMA Negeri 4 Singaran Pati District, Bengkulu City)

Evaluasi Ketepatan Sasaran Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)

(Studi Kasus Pada Sd Negeri 52, Smp Negeri 6, Dan Sma Negeri 4 Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu)



Siska Octri Rahmadani ^a
Henny Aprianty ^b
Bobby Mandala Putra ^c

Article history:

Submitted: 04-05-2026

Revised: 14-06-2026

Accepted: 23-06-2026

Keywords:

Program Evaluation, Intelligent Indonesia Initiative, Targeting Precision, Fluid Poverty

Abstract

This study was driven by the inconsistency between official administrative data and the true economic conditions of Smart Indonesia Program (PIP) beneficiaries, resulting in improper targeting. This research seeks to assess the precision of targeting PIP beneficiaries and determine the factors contributing to this inaccuracy. The theoretical framework applied is William N. Dunn's theory of public policy evaluation, particularly focusing on the criteria of effectiveness, fairness, and precision, alongside Subarsono's notion of targeting precision. The approach used in this study is a qualitative method featuring a case study design. Techniques for data collection encompassed detailed interviews, observation, and record-keeping. The findings suggest that the execution of the Smart Indonesia Program (PIP) has proven successful in ensuring continuous academic engagement for students. Nonetheless, significant targeting precision has not been completely realized because of inclusion and exclusion mistakes. Internal factors consist of schools' limited ability to verify facts, whereas external factors are shaped by the unchanging quality of formal poverty data (Dapodik/DTKS), which does not reflect the reality of "dynamic poverty" in practice. In summary, the identification of PIP recipients continues to be influenced more by the availability of administrative documents than by the actual welfare status of the students.

Keywords: Evaluation Programme, Intelligent Indonesia Initiative, Targeting Precision, Fluid Poverty

^a Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Indonesia

^b Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Indonesia

^c Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kontradiksi antara data administratif formal dengan realitas ekonomi riil penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), yang memicu terjadinya ketidaktepatan sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat PIP serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaktepatan tersebut. Landasan teoritis yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan publik William N. Dunn khususnya kriteria efektivitas, keadilan dan ketepatan, serta konsep ketepatan sasaran oleh Subarsono. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP telah efektif dalam menjaga keberlangsungan studi siswa. Namun, ketepatan sasaran secara substantive belum sepenuhnya terwujud akibat adanya *inclusion error* dan *exclusion error*. Faktor internal penyebabnya meliputi rendahnya kapasitas verifikasi faktual sekolah, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh sifat data kemiskinan formal (Dapodik/DTKS) yang cenderung statis sehingga gagal menangkap fenomena “kemiskinan dinamis” di lapangan. Kesimpulannya, penentuan penerima PIP masih didominasi oleh kepemilikan dokumen administrative daripada kondisi kesejahteraan riil siswa.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Program Indonesia Pintar, Ketepatan Sasaran, Kemiskinan Dinamis

JURNAL ISIP VOICE Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ©2026.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Siska Octri Rahmadani*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

Email address: siskaoctri21@gmail.com

1. Pendahuluan

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung wajib belajar 12 tahun melalui pemberian bantuan tunai bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Meskipun program ini bertujuan memperluas akses dan kesempatan belajar, pelaksanaan kebijakan di lapangan masih menghadapi kendala signifikan terkait akurasi data dan ketepatan sasaran. Ketidaksesuaian antara data administratif formal (Dapodik/DTKS) dengan kondisi ekonomi riil siswa sering kali memicu terjadinya *inclusion error* (bantuan diterima oleh pihak yang tidak layak) dan *exclusion error* (siswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar).

Fenomena ini menjadi perhatian krusial di wilayah Kota Bengkulu, khususnya pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan pengamatan awal, distribusi bantuan PIP di SD Negeri 52, SMP Negeri 6, dan SMA Negeri 4 Kecamatan Singaran Pati belum sepenuhnya selaras dengan kondisi kesejahteraan objektif siswa. Kesenjangan ini diperparah oleh adanya fenomena "kemiskinan dinamis", di mana keluarga yang mendadak jatuh miskin akibat kehilangan pekerjaan atau bencana alam tidak segera terakomodasi dalam basis data statis pemerintah. Secara teoretis, evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn menekankan pentingnya kriteria efektivitas, keadilan, dan ketepatan untuk mengukur keberhasilan suatu program. Namun, dalam praktiknya, mekanisme verifikasi dan validasi data yang masih bergantung pada basis data statis sering kali menghambat prinsip keadilan

sosial tersebut. Hal ini menunjukkan adanya *research gap* dalam literatur kebijakan pendidikan, di mana pendekatan evaluasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan dinamis di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan sasaran penerima manfaat PIP di SD Negeri 52, SMP Negeri 6, dan SMA Negeri 4 Kota Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran tersebut. Fokus penelitian ini secara eksplisit menjawab dua rumusan masalah: (1) Bagaimana ketepatan sasaran penerima bantuan PIP di lokasi penelitian? dan (2) Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran bantuan PIP?. Relevansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam memperkaya studi evaluasi kebijakan sosial. Dengan mengombinasikan kriteria evaluasi Dunn dan konsep ketepatan sasaran dari Subarsono, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai keterkaitan antara data administratif dan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Hasil studi ini diharapkan menjadi masukan empiris bagi pemangku kebijakan untuk menyempurnakan mekanisme pendataan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat yang dinamis.

Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran bagi satuan pendidikan mengenai pentingnya koordinasi dan transparansi dalam proses pengusulan calon penerima bantuan. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini menjadi sarana penyampaian aspirasi terkait kendala aksesibilitas program guna mendorong distribusi manfaat yang lebih adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi nyata atas permasalahan ketepatan sasaran yang menjadi hambatan utama dalam implementasi PIP di tingkat lokal. Penelitian ini mengusung konsep 'kemiskinan dinamis' (*dynamic poverty*) untuk menjelaskan kesenjangan data. Berbeda dengan kemiskinan struktural yang bersifat permanen, kemiskinan dinamis merujuk pada kerentanan ekonomi yang muncul tiba-tiba akibat faktor eksternal, seperti kehilangan pekerjaan orang tua atau bencana. Basis data pemerintah yang cenderung statis (Dapodik/DTKS) seringkali tidak mampu merespons perubahan status sosial ekonomi keluarga secara *real-time*, sehingga menciptakan jeda waktu (*time lag*) yang menyebabkan siswa miskin baru tidak segera terakomodasi dalam program bantuan.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) secara holistik. Metode deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran detail mengenai pelaksanaan program, tingkat ketepatan sasaran, serta faktor penyebab ketidaktepatan berdasarkan data empiris. Subjek penelitian terdiri dari 13 informan yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yang mencakup kepala sekolah, operator sekolah, guru wali kelas, serta siswa dan orang tua siswa penerima manfaat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa data Dapodik serta laporan terkait untuk mendukung validitas penelitian. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif. Untuk menjamin kredibilitas dan validitas temuan, penelitian ini menggunakan triangulasi data sebagai teknik verifikasi silang. Peneliti melakukan konfirmasi antara data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam (melibatkan kepala sekolah, operator, guru, orang tua, dan siswa) dengan data sekunder, seperti laporan administratif sekolah dan data Dapodik/DTKS.

Selain itu, observasi non-partisipan dilakukan untuk mencocokkan pengakuan informan dengan kondisi nyata di lingkungan sekolah, guna memastikan bahwa kesimpulan penelitian tidak hanya didasarkan pada satu perspektif saja. Mengingat penelitian ini difokuskan pada tiga satuan pendidikan (SD Negeri 52, SMP Negeri 6, dan SMA Negeri 4) di Kecamatan Singaran Pati, hasil temuan ini bersifat spesifik pada konteks lokal. Meskipun lokasi ini telah merepresentasikan jenjang pendidikan yang berbeda, temuan ini disarankan sebagai studi kasus awal. Untuk generalisasi yang lebih luas di tingkat Kota Bengkulu, diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan populasi yang lebih besar dan variasi geografis yang lebih beragam.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)

a. Efektivitas pada SD Negeri 52 Kota Bengkulu

Pelaksanaan PIP di SD Negeri 52 Kota Bengkulu dinilai efektif dalam menjaga keberlangsungan studi. Kepala Sekolah, Ibu Jarma Aini, S.Pd, menyatakan:

"Alhamdulillah memang sangat membantu, jadi apalagi di awal-awal kan orang tua murid itu perlu beli baju seragam, beli buku dan perlengkapan sekolah lainnya, dengan adanya PIP ini murid itu merasa terbantu" (Wawancara, 27 April 2026).

Meskipun demikian, dana ini dipandang sebagai stimulan. Ibu Novia Kurnia Sari, S.Pd (Wali Kelas) menjelaskan:

"Memang cukup terbantu ya untuk membeli keperluan sekolah tetapi kalau untuk kebutuhan semuanya memang belum cukup, tapi setidaknya bisa mengurangi beban orang tuanya" (Wawancara, 27 April 2026)

Dampak psikologisnya dirasakan oleh siswa, seperti ZF yang mengungkapkan:

"Iya Kak, jadi semangat karena tidak kepikiran biaya lagi. Rasanya lebih ringan soalnya kasihan sama Ibu kalau harus cari uang terus buat keperluan sekolah saya" (Wawancara, 27 April 2026)

b. Efektivitas pada SMP Negeri 6 Kota Bengkulu

Di SMP Negeri 6, program ini krusial bagi siswa menengah ke bawah. Kepala Sekolah, Ibu Septalena, S.Pd, menyatakan:

"Ibu kira anak-anak kami ini kan sudah berapa persen ya dapat PIP itu. Jadi memang ya sangat membantu untuk program PIP ini, karena ya kita tahu bahwa anak-anak di SMPN 6 ini pada umumnya ekonominya yaitu menengah ke bawah jadi ya sangat membantu sekali" (Wawancara, 28 April 2026).

Program ini juga mencegah putus sekolah, sebagaimana diungkapkan Ibu Hidayah Mustika Canggih, S.Pd (Wali Kelas):

"Kemarin ada salah satu anak ya terkendala lokasi dari rumah ke sekolah itu jauh, terus dia itu kebetulan tinggal sama kakaknya, dan orang tuanya ini maaf kata pisah jadi tidak tinggal sama orang tuanya. Nah jadi dengan program ini otomatis anak yang seperti itu layak mendapatkan bantuan tersebut sangat terbantu untuk membeli peralatan sekolah seperti buku, pena dan lainnya" (Wawancara, 28 April 2026).

c. Efektivitas pada SMA Negeri 4 Kota Bengkulu

Di SMA Negeri 4, terdapat kendala pengawasan. Kepala Sekolah, Bapak Sariful Maliki, M.Pd, mengatakan:

"Pada dasarnya program pemerintah ini bagus untuk mengatasi putus sekolah mereka, akan tetapi sering saya menemukan pengelolaan anak itu sendiri, dana yang diterima kadang tidak digunakan untuk pendidikan, yang seharusnya untuk membeli sepatu, alat tulis, nah ternyata dipergunakan untuk kebutuhan yang lain" (Wawancara, 30 April 2026)

Namun, siswa tetap merasakan manfaatnya, seperti SR:

"Jujur sih kak adanya bantuan PIP ini sangat berpengaruh. Uang itu membantu sekali untuk bayar iuran sekolah atau beli perlengkapan seperti sepatu dan seragam yang sudah rusak. Tentunya jadi semangat kak karena saya merasa beban orang tua berkurang, jadi saya tidak terlalu kepikiran soal biaya dan bisa lebih fokus belajar sampai lulus nanti" (Wawancara, 30 April 2026)

d. Keadilan pada SD Negeri 52 Kota Bengkulu

Sekolah menerapkan keadilan prosedural melalui verifikasi wali kelas. Ibu Een Putri Yani, S.Kep (Operator) menyatakan:

"Kalau itu saya biasanya konfirmasi dulu ke wali kelas nah mana yang pantas untuk mendapatkan PIP ini, siapa aja gitu karena kan kita udah tau data ini yang banyak tau itu wali kelas. Jadi yang mengumpulkan berkas-berkas itulah yang kami usulkan" (Wawancara, 27 April 2026).

Namun, masih muncul persepsi ketidakadilan substantif. Ibu ST (Wali Murid) berpendapat:

"Menurut saya pribadi bantuannya seperti belum sepenuhnya adil, karena sebagian anak yang orang tuanya kurang mampu masih ada yang tidak terdaftar bantuannya" (Wawancara, 27 April 2026).

e. Keadilan pada SMP Negeri 6 Kota Bengkulu

Sekolah menggunakan data Dapodik untuk memfilter penerima. Kepala Sekolah, Ibu Septalena, S.Pd, menjelaskan:

"Ya itu kan kita lihat dari datanya, data di dapodik (data anak). Pada umumnya kalau di SMPN 6 ini, anak-anaknya yang orang tuanya memang yang kurang, menengah ke bawah. Tapi kalau anak-anak yang sepengetahuan ibu, orang tuanya pegawai ASN itu tidak dapat kan ada di Dapodik semua pekerjaan orang tua, dan penghasilannya" (Wawancara, 28 April 2026).

Namun, ketidakmerataan masih dirasakan oleh siswa, seperti GM:

"Kalo saya lihat-lihat ya mba, masih ada teman yang kondisi ekonominya kurang mampu tapi belum mendapatkan bantuan PIP ini. Jadi menurut saya pembagiannya belum sepenuhnya merata" (Wawancara, 28 April 2026).

f. Keadilan pada SMA Negeri 4 Kota Bengkulu

Proses pengusulan melibatkan pihak eksternal. Bapak Sariful Maliki, M.Pd menjelaskan:

"Prosedur penentuan penerima itu pada dasarnya dibangun oleh pemerintah itu kan mulai dari RT, yang kedua melalui visi misi Dewi Coryati nah segala penentuan persyaratan itu diurus oleh yang memegang zona wilayah itu. Pada saat itu data langsung masuk ke sekolah. sekolah ini cuma memberikan keterangan bahwa anak itu betul anak kami, cuma itu aja" (Wawancara, 30 April 2026).

Hal ini memicu persepsi ketidakadilan, sebagaimana diungkapkan QN:

"Kalau menurutku sih belum rata banget ya Kak. Soalnya aku lihat ada temanku yang rumahnya jauh dan bapaknya cuma kerja serabutan malah nggak dapat. Padahal dia lebih butuh dibanding beberapa anak lain yang kondisinya kayaknya lebih mampu" (Wawancara, 30 April 2026).

g. Ketepatan pada SD Negeri 52 Kota Bengkulu

Ketepatan program dipengaruhi keterbatasan nominal. Kepala Sekolah, Ibu Jarma Aini, S.Pd, mengatakan:

"Kalau sebagai solusi yang tepat mungkin belum karna kan dana yang terbatas, kalau dana kelas 1 itu 225 sedangkan kelas 2-6 itu 450 kalau tidak salah jadi kalau manfaatnya sih bermanfaat karena membantu tapi kalau untuk keseluruhan ya belum" (Wawancara, 27 April 2026).

Pihak sekolah berupaya memastikan penggunaan dana tepat sasaran. Ibu Een Putri Yani, S.Kep (Operator) menyatakan:

"Alhamdulillah mampu untuk membantu siswa disini, dengan bantuan ini dana yang diterima siswa gunakan benar-benar untuk memenuhi kebutuhan sekolah karna kebetulan di sekolah ini sebelumnya kami memanggil untuk wali murid bahwa bantuan ini digunakan untuk keperluan sekolah bukan untuk keperluan pribadi/foya-foya" (Wawancara, 27 April 2026).

h. Ketepatan pada SMP Negeri 6 Kota Bengkulu

Dana PIP dialihkan untuk kebutuhan penunjang belajar. Kepala Sekolah, Ibu Septalena, S.Pd, menegaskan:

"Memang iya tepat karena anak-anak itu, tapi karena di PIP ini kan memang untuk pendidikannya, tetapi kan kalau disekolah kita kan gratis ga bayar. Jadi, gunanya kami sampaikan kepada orang tua ini guna untuk kebutuhan sekolah misalnya untuk membeli sepatu yang sudah koyak itu kan perlu diganti, beli buku jadi jangan gunakan untuk kebutuhan hidup" (Wawancara, 28 April 2026).

Namun, menurut Ibu S (Wali Murid):

"Kalau untuk solusi meringankan, iya benar. Tapi kalau dibilang cukup untuk semua kebutuhan mendesak, ya jujur saja masih kurang. Kadang uangnya habis buat beli buku dan seragam saja, sementara untuk biaya harian atau kegiatan lain kami masih harus cari-cari tambahan sendiri" (Wawancara, 28 April 2026).

Analisis Aspek Administratif dan Substantif**a. Aspek Administratif dan Substantif di SD Negeri 52 Kota Bengkulu**

Secara administratif, sekolah telah berupaya menciptakan sistem pengusulan yang objektif dengan melibatkan wali kelas sebagai verifikator utama. Ibu Een Putri Yani, S.Kep (Operator Sekolah) menyatakan:

"Kalau itu saya biasanya konfirmasi dulu ke wali kelas nah mana yang pantas untuk mendapatkan PIP ini, siapa aja gitu karena kan kita udah tau data ini yang banyak tau itu wali kelas. Jadi yang mengumpulkan berkas-berkas itulah yang kami usulkan" (Wawancara, 27 April 2026).

Namun, secara substantif, masih ditemukan celah antara kebijakan dan realitas di lapangan. Evaluasi dari penerima manfaat menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya dirasakan. Ibu ST, salah seorang wali murid, mengatakan:

"Menurut saya pribadi bantuannya seperti belum sepenuhnya adil, karena sebagian anak yang orang tuanya kurang mampu masih ada yang tidak terdaftar bantuannya" (Wawancara, 27 April 2026).

Kesenjangan ini dikonfirmasi oleh siswa, seperti yang diungkapkan ZF:

"Kayaknya sudah banyak yang dapat Kak, tapi ada satu teman saya yang bapaknya cuma tukang parkir sepertinya belum dapat. Padahal dia sering cerita kalau belum bayar uang iuran buku" (Wawancara, 27 April 2026).

b. Aspek Administratif dan Substantif di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu

Secara administratif, sekolah mengandalkan data Dapodik untuk memfilter calon penerima. Ibu Septalena, S.Pd (Kepala Sekolah) menjelaskan: *"Ya itu kan kita lihat dari datanya, data di dapodik (data anak). Pada umumnya kalau di SMPN 6 ini, anak-anaknya yang orang tuanya memang yang kurang, menengah ke bawah. Tapi kalau anak-anak yang sepengetahuan ibu, orang tuanya pegawai ASN itu tidak dapat kan ada di Dapodik semua pekerjaan orang tua, dan penghasilannya"* (Wawancara, 28 April 2026).

Dari sisi substantif, sekolah telah berusaha maksimal, namun persepsi ketidakpuasan tetap muncul. Ibu S (Wali Murid) merasakan bahwa bantuan belum menjangkau seluruh warga yang memiliki kualifikasi ekonomi serupa:

"Kalau soal adil, saya rasa sekolah sudah berusaha. Tapi ya namanya di lingkungan sini, masih ada saja warga yang sebenarnya kondisinya mirip dengan saya tapi belum pernah dapat bantuan sama sekali. Jadi rasanya belum merata untuk semua anak yang kurang mampu" (Wawancara, 28 April 2026). Hal ini senada dengan pengamatan siswa, GM:

"Kalo saya lihat-lihat ya mba, masih ada teman yang kondisi ekonominya kurang mampu tapi belum mendapatkan bantuan PIP ini. Jadi menurut saya pembagiannya belum sepenuhnya merata" (Wawancara, 28 April 2026).

c. Aspek Administratif dan Substantif di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu

Secara administratif, sekolah berperan sebagai fasilitator administrasi, sementara penentuan kelayakan lebih banyak didasarkan pada data pusat dan jalur aspirasi. Bapak Sariful Maliki, M.Pd (Kepala Sekolah) menjelaskan:

"Prosedur penentuan penerima itu pada dasarnya dibangun oleh pemerintah itu kan mulai dari RT, yang kedua melalui visi misi Dewi Coryati nah segala penentuan persyaratan itu diurus oleh yang memegang zona wilayah itu. Pada saat itu data langsung masuk ke sekolah. sekolah ini cuma memberikan keterangan bahwa anak itu betul anak kami, cuma itu aja" (Wawancara, 30 April 2026).

Dampak substantif dari mekanisme ini adalah munculnya persepsi ketidakadilan bagi mereka yang secara ekonomi sangat layak namun tidak tersentuh. Ibu MR (Orang tua siswa) menuturkan:

"Ya saya lihat masih ada beberapa siswa yang keluarganya ekonominya ke bawah tetapi dia tidak dapat bantuan PIP itu, kemarin saya tanya kepada anaknya katanya dia sudah mengajukan persyaratan PIP itu tetapi tidak dapat bantuan itu" (Wawancara, 30 April 2026). Hal ini diperkuat oleh siswa, QN:

"Kalau menurutku sih belum rata banget ya Kak. Soalnya aku lihat ada temanku yang rumahnya jauh dan bapaknya cuma kerja serabutan malah nggak dapat. Padahal dia lebih butuh dibanding beberapa anak lain yang kondisinya kayaknya lebih mampu" (Wawancara, 30 April 2026).

Ketergantungan sekolah pada basis data pusat menunjukkan adanya sentralisasi kebijakan yang membatasi diskresi lokal dalam melakukan verifikasi faktual. Sekolah, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam validasi, justru tereduksi perannya menjadi sekadar fasilitator administratif. Hal ini mengindikasikan bahwa desain kebijakan PIP saat ini lebih mengedepankan efisiensi administratif daripada prinsip keadilan distributif, yang seharusnya menuntut fleksibilitas untuk mengakomodasi realitas ekonomi siswa yang tidak selalu tercermin dalam dokumen formal.

Faktor Penyebab Ketidaktepatan Sasaran

Analisis di lapangan menunjukkan adanya kendala sistemik yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran. Secara umum, faktor penyebabnya meliputi:

a. Faktor Penyebab di SD Negeri 52 Kota Bengkulu

Ketidaktepatan di sekolah ini berakar pada ketergantungan terhadap basis data yang tidak selalu memperbarui kondisi ekonomi siswa secara *real-time*. Sekolah hanya berperan sebagai fasilitator administratif, sementara penetapan penerima dilakukan oleh sistem pusat. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Jarma Aini, S.Pd (Kepala Sekolah):

"Kalau sebagai solusi yang tepat mungkin belum karna kan dana yang terbatas... jadi kalau manfaatnya sih bermanfaat karena membantu tapi kalau untuk keseluruhan ya belum" (Wawancara, 27 April 2026).

Selain itu, terdapat risiko penyalahgunaan jika orang tua tidak disiplin, sehingga sekolah perlu melakukan pengawasan ketat, sebagaimana diungkapkan Ibu Een Putri Yani, S.Kep (Operator Sekolah):

"Alhamdulillah mampu untuk membantu siswa disini, dengan bantuan ini dana yang diterima siswa gunakan benar-benar untuk memenuhi kebutuhan sekolah karna kebetulan di sekolah ini sebelumnya kami memanggil untuk wali murid bahwa bantuan ini digunakan untuk keperluan sekolah bukan untuk keperluan pribadi/foya-foya" (Wawancara, 27 April 2026).

b. Faktor Penyebab di SMP Negeri 6 Kota Bengkulu

Di SMP Negeri 6, ketidaktepatan sasaran dipicu oleh sistem input data yang kaku. Meskipun sekolah telah menyaring data berdasarkan pekerjaan orang tua di Dapodik, masih ada kelompok "miskin dinamis" yang luput dari jangkauan. Ibu Septalena, S.Pd (Kepala Sekolah) menjelaskan:

"Memang iya tepat karena anak-anak itu, tapi karena di PIP ini kan memang untuk pendidikannya... Jadi, gunanya kami sampaikan kepada orang tua ini guna untuk kebutuhan sekolah misalnya untuk membeli sepatu yang sudah koyak itu kan perlu diganti, beli buku jadi jangan gunakan untuk kebutuhan hidup" (Wawancara, 28 April 2026).

Selain itu, keterbatasan nominal bantuan membuat program ini belum sepenuhnya menutupi biaya operasional siswa secara komprehensif, sehingga bagi sebagian keluarga, bantuan ini hanya bersifat sementara, seperti diungkapkan Ibu S (Wali Murid):

"Kalau untuk solusi meringankan, iya benar. Tapi kalau dibilang cukup untuk semua kebutuhan mendesak, ya jujur saja masih kurang" (Wawancara, 28 April 2026).

c. Faktor Penyebab di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu

Faktor utama ketidaktepatan di SMA Negeri 4 adalah terputusnya kendali sekolah atas verifikasi kelayakan siswa akibat keterlibatan pihak eksternal. Pihak sekolah cenderung pasif karena data penerima seringkali berasal dari jalur aspirasi (seperti aspirasi Dewi Coryati) atau data pemerintah pusat tanpa melalui validasi rumah tangga (*home visit*) oleh sekolah. Bapak Sariful Maliki, M.Pd (Kepala Sekolah) mengidentifikasi masalah utama pada pola penggunaan dana:

"Pada dasarnya program pemerintah ini bagus untuk mengatasi putus sekolah mereka, akan tetapi sering saya menemukan pengelolaan anak itu sendiri, dana yang diterima kadang tidak digunakan untuk pendidikan, yang seharusnya untuk membeli sepatu, alat tulis, nah ternyata dipergunakan untuk kebutuhan yang lain" (Wawancara, 30 April 2026).

Hal ini diperparah dengan kurangnya sinkronisasi antara keinginan siswa yang membutuhkan dengan realitas data yang sudah terdaftar di pusat, yang pada akhirnya memicu munculnya *inclusion error* (siswa mampu yang menerima bantuan) dan *exclusion error* (siswa miskin yang terabaikan karena data yang sudah tidak relevan).

Pembahasan**a. Efektivitas Program: Antara Akses Pendidikan dan Kebutuhan Rill**

Berdasarkan hasil penelitian, Program Indonesia Pintar (PIP) di ketiga sekolah tersebut telah menunjukkan efektivitas yang positif dalam konteks menjaga keberlangsungan studi siswa. Temuan di lapangan melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 52 menunjukkan bahwa dana PIP sangat membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti seragam dan buku di awal tahun ajaran. Hal serupa ditemukan di SMA Negeri 4, di mana bantuan ini menjadi faktor penenang secara psikologis yang memotivasi siswa untuk tetap bersekolah.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan kriteria Efektivitas dari William N. Dunn (2003) yang mengukur sejauh mana hasil kebijakan mencapai tujuannya. PIP terbukti efektif sebagai "jaring pengaman" ekonomi pendidikan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa dana tersebut hanyalah stimulan dan belum mencukupi

seluruh variabel biaya pendidikan harian. Temuan ini memperkuat penelitian Wahyudi (2021) yang menyatakan bahwa PIP efektif untuk kebutuhan barang (buku/seragam), namun masih lemah dalam meng-cover biaya operasional harian siswa.

b. Analisis Ketepatan Sasaran: Kesenjangan Administratif dan Substantif

Evaluasi ketepatan sasaran ditinjau melalui dua aspek utama menurut Subarsono (2011) : Aspek Administratif dan Aspek Substantif.

1) Aspek Administratif (Data Formal)

Di tingkat sekolah, ketertiban administratif telah tercapai karena proses pengusulan didasarkan pada dokumen formal seperti KIP, KKS, atau SKTM. Namun, ditemukan masalah mendasar pada sinkronisasi data antara Dapodik dan DTKS. Sekolah seringkali hanya menjadi mediator yang mengirimkan data tanpa memiliki kendali atas seleksi akhir di sistem kependudukan pusat.

2) Aspek Substantif (Kondisi Lapangan)

Terjadi fenomena *inclusion error* (penerima mampu) dan *exclusion error* (siswa miskin tidak menerima). Di SD Negeri 52, ditemukan siswa yang ayahnya bekerja sebagai tukang parkir namun tidak menerima bantuan, sementara terdapat indikasi penerima yang secara ekonomi mampu tetap terjaring sistem. Ini menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara data statis dari pemerintah dengan kondisi nyata yang berubah-ubah di lapangan. Ketidaktepatan sasaran PIP di lokasi penelitian mencerminkan dua bentuk kegagalan evaluatif: *inclusion error*, di mana bantuan tetap mengalir kepada siswa yang secara ekonomi mampu, dan *exclusion error*, di mana siswa yang benar-benar membutuhkan tidak terdaftar. Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh kendala teknis pendataan, melainkan juga adanya disrupsi pada alur verifikasi akibat intervensi jalur aspirasi eksternal yang melompati validasi faktual di tingkat satuan pendidikan. Kondisi ini menegaskan bahwa mekanisme verifikasi saat ini masih bersifat formalistik-administratif dan gagal menjangkau realitas kesejahteraan siswa di lapangan.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kriteria Keadilan (Equity) yang dikemukakan oleh William N. Dunn (2003) belum sepenuhnya tercapai. Menurut William N. Dunn, keadilan dalam kebijakan publik dinilai dari apakah manfaat didistribusikan secara merata kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Dalam kasus PIP di Kecamatan Singaran Pati, distribusi bantuan masih lebih dominan didasarkan pada kepemilikan dokumen administrasi (Aspek Administratif) daripada kondisi ekonomi riil di lapangan (Aspek Substantif). Ketidaktepatan ini menciptakan rasa ketidakadilan bagi siswa yang secara substantif layak namun terhambat kendala birokrasi data. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Sitorus (2020) yang menegaskan bahwa ketepatan sasaran sangat bergantung pada kualitas pembaruan data yang tidak hanya mengandalkan angka di sistem, tetapi juga kepekaan terhadap perubahan status ekonomi masyarakat secara nyata.

c. Faktor Penyebab Ketidaktepatan Sasaran

Penelitian ini merujuk pada faktor internal dan eksternal menurut Masfiani (2024), untuk mengidentifikasi beberapa penyebab utama yaitu :

1) Rendahnya Kapasitas Verifikasi Faktual

Ketiga Sekolah (SDN Negeri 52, SMP Negeri 6, dan SMA Negeri 4) tidak melakukan mekanisme home visit atau kunjungan rumah karena keterbatasan personil dan wewenang. Verifikasi hanya bersifat formalistik berdasarkan kelengkapan berkas.

2) Ketergantungan Terhadap Data yang Tidak Berubah

Bapak Sariful Maliki, M.Pd (Kepala Sekolah SMA Negeri 4) menyoroti bahwa data yang digunakan bersifat konstan dan lama, sehingga tidak mampu memotret perubahan tingkat kesejahteraan siswa yang bergerak dinamis.

3) Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor

Terjadi “putus sambung” komunikasi antara pihak kelurahan/RT dengan pihak sekolah, menyebabkan data kemiskinan di tingkat wilayah tidak sinkron dengan data sekolah.

4) Intervensi Tim Aspirasi

Di SMA Negeri 4, ditemukan model unik di mana tim eksternal (Tim Aspirasi) memiliki peran dominan dalam teknis pengumpulan berkas. Hal ini mempermudah akses tetapi di sisi lain membuat sekolah kehilangan fungsi kontrol verifikasi substantifnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Ketepatan Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di tiga sekolah, dapat disimpulkan bahwa secara umum program ini telah efektif dalam menjaga keberlangsungan studi siswa dan mencegah risiko putus sekolah melalui pemenuhan kebutuhan personal, meskipun bantuan tersebut masih bersifat stimulan dan belum mencakup seluruh variabel biaya pendidikan. Kendati demikian, prinsip keadilan belum sepenuhnya tercapai karena adanya kesenjangan antara data formal dengan realitas ekonomi di lapangan; penentuan penerima bantuan lebih didominasi oleh kelengkapan dokumen administratif dibandingkan kondisi kesejahteraan substantif. Akibatnya, masih terjadi inclusion error, di mana siswa dari keluarga mampu tetap menerima bantuan, serta exclusion error bagi siswa dari keluarga miskin yang terkendala birokrasi data. Ketidaktepatan sasaran ini dipicu oleh faktor internal, yakni rendahnya kapasitas verifikasi faktual di tingkat sekolah yang cenderung pasif, serta faktor eksternal berupa data kemiskinan yang bersifat statis dan tidak mampu merespons dinamika perubahan ekonomi masyarakat secara cepat, ditambah dengan lemahnya kontrol sosial dan transparansi dalam proses pendataan di lapangan.

Saran:

Untuk memperbaiki ketepatan sasaran PIP di SDN 52, SMPN 6, dan SMAN 4 Kota Bengkulu, pemerintah perlu melakukan integrasi data *real-time* antara Dapodik dan DTKS yang lebih fleksibel, serta memperketat pengawasan melalui verifikasi lapangan (*spot check*). Di tingkat sekolah, peran wali kelas dalam observasi langsung atau kunjungan rumah harus dioptimalkan untuk validasi data, dibarengi dengan peningkatan transparansi daftar penerima guna memicu kontrol sosial masyarakat. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji efektivitas penggunaan dana PIP oleh orang tua serta melakukan studi komparatif antara jalur penerimaan reguler (DTKS) dengan jalur aspirasi legislatif.

5. Daftar Pustaka

- Adelia, P., Handayani, Z., Rakista, R., & Yuvia, D. (2025). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Pendidikan di Indonesia: Analisis Efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS. *Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1158–1165.
- Badan Pusat Statistik (BPS) & TNP2K. (2020). *Laporan Evaluasi DTKS: Tantangan dan Inovasi dalam Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: BPS.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jumanah, J., & Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 52–66. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.99>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.
- Sari, D. P., et al. (2022). Efektivitas Program Indonesia Pintar dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Daerah Tertinggal: Studi Kasus Provinsi Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(2), 145-160.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sidiq Khairullah, M., & Al Hidayat, R. (2023). Analisis Ketercapaian Program Indonesia Pintar Dalam Memberikan Bantuan Kepada Pelajar di SD Negeri 24 Kelurahan Panorama Kota Bengkulu. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 9(1), 59–66. <https://doi.org/10.56135/jsb.v9i1.76>
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- World Bank. (2018). *Indonesia's Poverty and Inequality: The Impact of Shocks and Policies*. Washington, DC: World Bank Group.
- Wulandari, R., & Suryadi, A. (2023). Tantangan Implementasi PIP di Provinsi Bengkulu: Analisis Geografis dan Sosial. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), 78-95.